SINERGi

Edisi IV Maret 2025



Negara yang Hadir

Dari Janji ke Dampak Nyata

DAFTAR ISI

3 Pengantar dan Arah Kebijakan
4 Tajuk Redaksi: Janji adalah Hutang: Menakar Kadar Kehadiran Negara
5 Kata Pengantar Ketua BP3U DPP PKS

7 FONDASI PEMIKIRAN
8 Catatan Ketua Majelis Syura PKS Transformasi Struktural Menuju Indonesia Maju

13 ANALISIS STRUKTURAL & KEBIJAKAN
14 Pembangunan untuk Siapa? Menagih Keadilan bagi yang Terpinggirkan
16 Membaca Arah Rupiah : Apakah APBN 2026 Sudah Berpihak pada Wong Cilik?
18 Navigasi Akar Rumput: Desa Sebagai Subjek dan Ujian Program Makan Bergizi Gratis

23 Catatan Ketua Deputi Pengawasan & Monitoring BP3U DPP PKS Dari Janji Kampanye ke KPI Kinerja: Membangun Dashboard Dampak Pejabat Publik
27 Catatan Deputi Data dan Petencanaan BP3U DPP PKS Akuntabilitas Berbasis Data: Jalan Kepemimpinan Pejabat Publik PKS yang Bermartabat

30 EDISI KHUSUS BIMTEK
31 Honey Trap : Jerat Asmara di Kursi Kuasa dan Erosi Integritas Pejabat Kita

39 ADVOKASI ALEG PKS DAN JEJAK PERJUANGAN LEGISLASI
40 Mengetuk Pintu Keadilan: Suara Parlemen untuk Hak Rakyat
43 Di Balik Meja Perundingan: Siasat Legislasi demi Dompet Rakyat
46 Gema di Daerah: Membumikan Keadilan di Setiap Jengkal Wilayah
49 Sebagian Jejak Digital Legislasi: Aspirasi yang Berbuah Kebijakan (Data & Fakta)

50 SEKILAS PKS
51 PKS Terima Penghargaan IIP 2025
52 Kecam Serangan AS-Israel Ke Iran, HNW Minta Prabowo Konsisten pada Konstitusi
52 Sekjen PKS Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran
53 Presiden PKS Kukuhkan Pengurus DKM Masjid Al 'Adalah 2025-2030

TIM PENGARAH: ● Presiden PKS ● Sekjen PKS ● Ketua BP3U ● Ketua Fraksi PKS DPR RI ● Ketua KSP. ● Ketua Bidang Komdigi **TIM PENGARAH KONTEN** ● Ketua BP3U Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si. ● Sekretaris BP3U dr. H. Pamungkas Hendra Kusuma ● Wakil Sekretaris BP3U Arief Rahman Hakim, S.I.Kom ● Kabiro Pembinaan Pejabaf Publik: Teddy Rusmawan, AT., MM. ● Kabiro Data Perencanaan: dr. Helmi Budiman, MM. ● Kabiro Monev: Dr. H. Agung Budi Margono, ST., MT. ● Kabiro Pembinaan Keluarga Pejabat Publik: Hj. Nevi Zaurina ● Kabiro Sistem Pendukung : H. Riza Falepi, ST., MT. **TIM REDAKSI** ● Chairoman J. Putro, B.Eng., M.Si. ● Dr. Apiatno, SE, MSi ● Daud Abdullah, STP **TIM PRODUKSI** ● Hafidz Muftisany ● Adiela ● Lisa Epriani ● Faiz Ayyas ● Boy Hamidy

1

Pengantar dan Arah Kebijakan

Janji adalah Hutang: Menakar Kadar Kehadiran Negara

Di republik ini, kata "hadir" sering kali mengalami inflasi makna. Ia kerap terjebak dalam keriuhan seremoni gunting pita atau sekadar nampang di baliho-baliho persimpangan jalan.

Namun, bagi jutaan warga di pelosok Papua atau di gang-gang sempit Jakarta, kehadiran negara tidak diukur dari desibel suara politisi, melainkan dari seberapa stabil harga beras, seberapa mudah akses ke puskesmas, dan seberapa adil hukum tegak bagi mereka yang tak punya kuasa.

Riset terbaru menunjukkan sebuah paradoks yang getir. Di satu sisi, indikator makro kita tampak molek: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyentuh angka 75,02 pada 2024—sebuah kenaikan yang patut diapresiasi dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan ekstrem pun terus ditekan lewat kucuran ratusan triliun rupiah bantuan sosial seperti PKH dan PIP. Namun di sisi lain, bayang-bayang state capture—pembajakan kebijakan oleh elite—masih nyata. Skandal tambang timah hingga rendahnya pengembalian aset korupsi (hanya 13% pada 2023) menjadi bukti bahwa "hadirnya negara" sering kali terdistorsi oleh sya hwat segelintir orang.

Kita harus berani jujur: infrastruktur fisik yang megah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) hanyalah separuh dari janji konstitusi. Separuh sisanya adalah kualitas manusia. Apa gunanya jalan aspal mulus jika sekolah di ujungnya kekurangan guru atau puskesmasnya tanpa tenaga medis? Apa arti listrik yang masuk desa jika warga tak mampu membayar tarifnya karena ekonomi lokal mati suri akibat monopoli elite desa?

Edisi kali ini mengajak kita untuk menagih akuntabilitas. Menjadikan janji bukan sebagai komoditas elektoral yang kedaluwarsa setelah pencoblosan, melainkan sebagai hutang yang harus dilunasi dengan dampak nyata. Karena pada akhirnya, rakyat tidak memakan angka statistik; mereka merasakan keadilan.

Apa arti listrik yang masuk desa jika warga tak mampu membayar tarifnya karena ekonomi lokal mati suri akibat monopoli elite desa?

Kata Pengantar

Ketua BP3U DPP PKS)

Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.



Transisi kepemimpinan nasional selalu membawa harapan baru sekaligus tantangan yang tidak sederhana. Di bawah payung besar Asta Cita, kita sedang bergerak menuju narasi besar Indonesia Emas 2045. Namun, sebagai organisasi yang berdiri di garis depan pembinaan dan pengawalan kebijakan, BP3U memahami bahwa visi besar tidak akan pernah mendarat dengan selamat tanpa birokrasi yang bersih dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat kecil.

Data dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan Rasio Gini kita melandai ke angka 0,379 pada Maret 2024. Ini adalah sinyal positif bahwa intervensi melalui bantuan sosial dan subsidi mulai memberikan napas bagi pengeluaran masyarakat. Namun, kita tidak boleh berpuas diri.

Tantangan sesungguhnya ada pada efektivitas eksekusi di tingkat akar rumput. Fenomena elite capture di tingkat desa masih sering menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, di mana kedekatan dengan pimpinan formal menjadi penentu akses kesejahteraan.

BP3U berkomitmen untuk terus menjadi "jembatan" yang kokoh. Kita bertugas memasti-kan bahwa alokasi 20% anggaran pendidikan—yang

Tantangan sesungguhnya ada pada efektivitas eksekusi di tingkat akar rumput. Fenomena elite capture di tingkat desa masih sering menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, di mana kedekatan dengan pimpinan formal menjadi penentu akses kesejahteraan

mencapai Rp608,3 triliun pada 2023—dan transformasi layanan kesehatan lewat JKN benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Kita harus memastikan program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola dengan integritas, sehingga menjadi multiplier effect bagi petani dan UMKM lokal, bukan sekadar beban anggaran baru yang bocor di tengah jalan.



Kehadiran negara harus bersifat utuh: mulai dari pemenuhan gizi di masa janin, pendidikan bermutu di masa remaja melalui peningkatan rata-rata lama sekolah (yang kini di angka 8,85 tahun), hingga jaminan hari tua yang bermartabat. Kekuasaan, pada hakikat-nya, hanyalah alat untuk melayani. Tanpa rasa kemanusiaan, kebijakan hanya akan menjadi barisan angka yang dingin. Melalui edisi ini, kami ingin menegaskan kembali mandat strategis kita: mengawal setiap rupiah uang rakyat agar kem-bali menjadi senyum di wajah rakyat.

Selamat membaca. Mari terus bersinergi untuk Indonesia yang lebih adil.

*Penulis adalah Ketua Badan Pembinaan Pejabat Publik (BP3U) DPP PKS

2

Fondasi Pemikiran

KETUA MAJELIS SYURA PKS Mohamad Sohibul Iman, Ph. D

Transformasi Struktural Menuju Indonesia Maju



Pertanyaan penting yang selalu menggelayut di benak kita saat ini adalah, apakah Bangsa Indonesia sudah mencapai tujuan kemerdekaan sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Atau sebaliknya, masih jauh atau bahkan melenceng dari cita-cita kemerdekaan yang dirintis oleh para pendiri bangsa?

Angka-angka statistik kesejahteraan yang selalu progresif seolah-olah tidak tergambar dalam

kondisi rill masyarakat hari ini. Kondisi tersebut sudah selayaknya menjadi refleksi kita hari ini.

Tujuan bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Harapan para pendiri bangsa untuk dapat melihat Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan tersebut, ibaratnya masih jauh panggang dari api. Tuntutan masyarakat yang datang secara bergelombang akhir-akhir ini, mengisyaratkan masih besarnya ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat kita hari ini.

Fasilitas dan gaya hidup sebagian pejabat publik telah menganggu kohesi sosial dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini seperti pemantik yang siap terbakar kapan saja.

Janji dan komitmen politik Presiden Prabowo Subianto yang akan selalu membela kepentingan rakyat, tentunya membawa harapan baru dan angin segar untuk segera terjadinya perubahan yang fundamental bagi bangsa dan negara.

Dengan segala pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya, Presiden Prabowo memiliki modal yang kuat untuk memikul harapan besar masyarakat Indonesia, untuk segera merasakan kesejahteraan yang selalu digaungkan dan dijanjikan oleh setiap pemimpin sebelumnya.

Delapan agenda strategis nasional menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi para pemangku kebijakan, untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan yang adil dan merata, pendidikan yang mencerdaskan dan layanan kesehatan yang bisa diakses

Presiden Prabowo harus memastikan pelaksanaan kebijakan transformasi struktural menjadi agenda prioritas dan konsisten untuk diteruskan, berlaku untuk semua proses perbaikan, serta memiliki keberlanjutan pembangunan di semua bidang, sehingga cita-cita menuju negara maju benar-benar bisa terwujud."



oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Bukan malah sebaliknya, ekonomi yang semakin timpang, kualitas pendidikan yang tidak merata, layanan kesehatan yang jauh dari standar, serta rasa keadilan sosial yang makin menjauh.

Perjalanan Pemerintahan yang akan memasuki periode satu tahun, sudah bisa diraba arah dan tujuannya. Banyak rencana dan kebijakan yang sudah dijalankan dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat, patut untuk mendapatkan apresiasi dan dukungan.

Begitupula dengan terobosan-terobosan kebijakan Pemerintah dalam bentuk transformasi struktural untuk melahirkan regulasi, birokrasi dan sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kemajuan bangsa, perlu terus diperkuat.

Keinginan besar untuk melakukan perubahan tetap harus dilakukan secara gradual dan bertahap, dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan yang didesain untuk melanjutkan transformasi struktural dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengalaman negara-negara sebelumnya, Jepang, Korea dan Cina, menunjukkan bagaimana peran pemimpin dalam menyinergikan regulasi dan kepastian hukum, birokrasi yang efektif dan efisien, serta SDM dan teknologi yang mumpuni sebagai lokomotif perubahan.

Pintu masuk ke ranah politik harus dibuat semudah dan semurah mungkin, agar para elit tidak dikuasai oleh para pemilik modal semata. Hal ini menjadi syarat untuk membangun politik gagasan dan substantif, sekaligus mengikis praktik politik transaksional.

Koridor Transformasi Struktural Menuju Indonesia Maju

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan manifestasi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yang harus dilakukan secara terukur, sistematis dan terarah. Pemerintah dan seluruh stakeholder bangsa perlu terus berupaya melakukan transformasi struktural untuk mempercepat pembangunan ekonomi dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Semuanya perlu dijalankan dalam koridor-koridor yang sudah diamanatkan dalam konstitusi.

Koridor pertama, semua kebijakan transformasi struktural harus sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Jangan sampai ada regulasi atau ketentuan yang disahkan justru menyimpang dari ruh konstitusi hanya untuk melindungi kepentingan tertentu. Hal ini penting, agar bangsa Indonesia memiliki pijakan yang kuat dan kokoh dalam menghadapi peta persaingan global yang semakin keras dan tidak menentu.

Koridor kedua, menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Hak-hak masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha harus diberikan jaminan. Selain itu, memperbaiki renumerasi pejabat publik yang adil dan proporsional dengan upah minimum.

Jangan sampai transformasi yang dilakukan hanya berpihak ke investor atau para pemilik modal saja, tetapi di saat yang sama tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja dan sebagian besar rakyat Indonesia.

Koridor ketiga, memperkuat demokrasi dan desentralisasi fiskal. Pilihan untuk mengambil jalan demokrasi dan desentralisasi fiskal dalam menjalankan amanat reformasi harus terus dijaga dan diperkuat.

Jangan sampai ada upaya melakukan upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak-hak demokrasi rakyat. Karena semangat reformasi yang sudah dijalankan adalah semangat demokratisasi dan desentralisasi untuk mencapai kemajuan bangsa.

Koridor keempat, membangun



SDM dan teknologi yang sesuai dan tepat guna. Tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan utama yang masih dihadapi adalah kualitas SDM yang masih lemah.

Hal tersebut tercermin dari daya saing dan produktivitas yang rendah di kalangan negara-negara peers. Transformasi struktural hendaknya juga menyasar perbaikan kualitas pendidikan, layanan Kesehatan, serta penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Koridor Kelima, memangkas biaya politik dan membangun budaya politik yang substantif. Keberhasilan transformasi struktural harus ditandai dengan ruang partisipasi publik yang semakin terbuka lebar. Pintu masuk ke ranah politik harus dibuat semudah dan semurah mungkin, agar para elit tidak dikuasai oleh para pemilik modal semata. Hal ini menjadi syarat untuk membangun politik gagasan dan substantif, sekaligus mengikis praktik politik transaksional.

Sudah saatnya Presiden Prabowo memimpin langsung proses transformasi struktural menuju pembangunan yang inklusif yang berkeadilan di semua bidang secara berkelanjutan. Selama ini, ide dan gagasan transformasi struktural selalu terbentur dengan kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek sehingga tidak memiliki keberlanjutan. Presiden harus memastikan bahwa akselerasi transformasi struktural di semua sektor menjadi kunci bagi percepatan pembangunan di segala bidang yang kuat dan kokoh.

Pada akhirnya, transformasi struktural diharapkan akan menghasilkan struktur ekonomi yang lebih produktif, kokoh, dan bernilai tambah tinggi, sehingga menjadi modal yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berkeadilan sesuai target yang sudah ditetapkan Pemerintah.

Presiden Prabowo harus memastikan pelaksanaan kebijakan transformasi struktural menjadi agenda prioritas dan konsisten untuk diteruskan, berlaku untuk semua proses perbaikan, serta memiliki keberlanjutan pembangunan di semua bidang, sehingga cita-cita menuju negara maju benar-benar bisa terwujud.

3

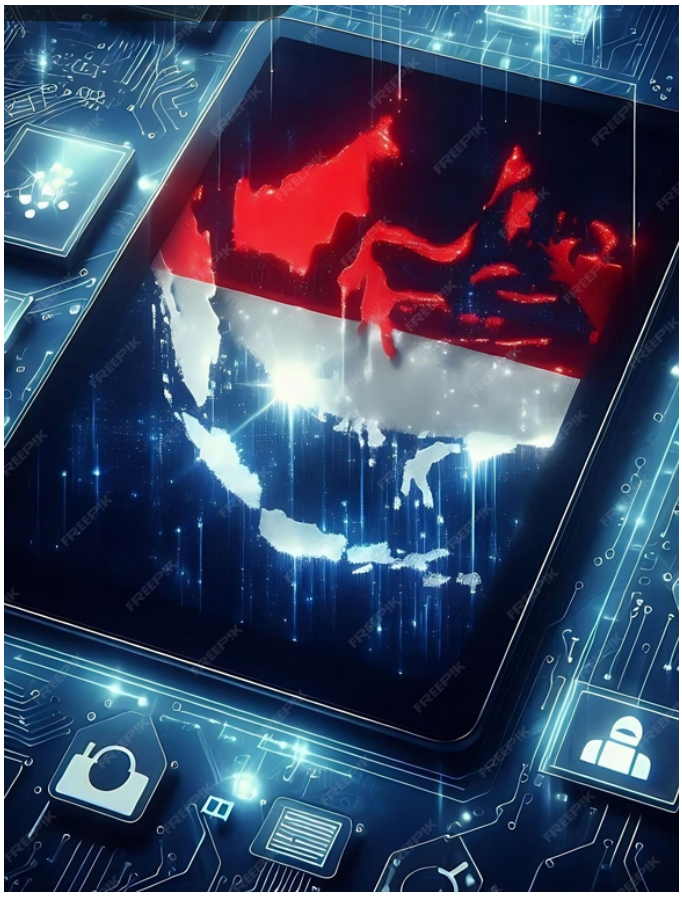
Analisis Struktural & Kebijakan

Pembangunan untuk Siapa?

Menagih Keadilan bagi yang Terpinggirkan

Konstitusi kita, lewat Pasal 33 UUD 1945, memberikan mandat yang sangat berat: bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Namun, dalam praktiknya, tafsir "dikuasai negara" sering kali tergelincir menjadi "dikuasai pemerintah" demi kepentingan investasi skala raksasa. Pertumbuhan ekonomi seringkali dibayar mahal dengan penggusuran ruang hidup masyarakat adat dan kelompok marginal yang suaranya nyaris tak terdengar di koridor kekuasaan Jakarta.

Kehadiran negara di lokasi-lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dirasakan secara ganda. Di satu sisi ada harapan lapangan kerja, namun di sisi lain ada kecemasan hilangnya identitas sosial. Mahkamah Konstitusi menegaskan fungsi negara adalah regeleren (mengatur) dan beheren (mengelola). Negara seharusnya bertindak sebagai wasit adil, bukan pemain yang mengejar profit dengan



mengabaikan hak dasar warga

Kita melihat paradoks ini di daerah 3T. Aspal yang mulus di pelosok Papua hingga NTT tidak bermakna jika gedung puskesmas tanpa dokter spesialis. Data menunjukkan ribuan puskesmas masih kekurangan tenaga medis, memaksa

warga menempuh perjalanan laut berjam-jam demi layanan kesehatan dasar. Pembangunan fisik beton harus dibarengi dengan pemulihan martabat warga melalui layanan yang setara.

Rata-rata lama sekolah kita yang di angka 8,85 tahun (setara kelas 9 SMP) adalah alarm keras. Pembangunan fisik sekolah tidak akan bermakna tanpa redistribusi guru yang merata. Kehadiran negara bukan sekadar membangun beton, tapi tentang memastikan setiap anak di pelosok negeri mendapatkan kualitas pengajaran yang setara dengan mereka yang ada di ibu kota.

Konflik agraria yang meningkat dalam satu dekade terakhir mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak rakyat. Seringkali izin konsesi perusahaan raksasa keluar di atas lahan garapan warga turun-temurun. Di sini negara dituntut hadir bukan dengan pendekatan keamanan, melainkan dengan pendekatan keadilan distributif yang memanusiakan warga.

Kelompok penyandang disabilitas dan masyarakat miskin kota masih berjuang mendapatkan akses fisik dan sosial. Kota-kota besar dibangun dengan narasi modernitas, namun seringkali tidak ramah bagi mereka yang rentan. Trotoar yang tinggi tanpa ramp atau transportasi publik yang belum inklusif adalah bukti fisik bahwa "hadirnya negara" belum menyentuh semua lapisan secara merata.

Kesenjangan digital divide antara kota dan desa masih menganga. Internet di pelosok seringkali hanya menjadi sarana konsumsi konten, bukan alat produksi ekonomi. Solusinya adalah literasi digital masif agar teknologi menjadi jembatan kemajuan, bukan jurang ketimpangan baru bagi masyarakat perdesaan yang terisolasi secara informasi. Penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah ruh kehadiran negara. Jika hukum tumpul ke atas dalam kasus sengketa lahan, maka kepercayaan publik akan runtuh. Rakyat memerlukan kepastian bahwa di bawah hukum, mereka memiliki posisi yang sama dengan para pemilik modal besar demi menjaga stabilitas sosial jangka panjang.

Secara filosofis, pembangunan haruslah memartabatkan manusia. Setiap kebijakan harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: "Apakah ini mengurangi penderitaan rakyat paling bawah?". Jika tidak, maka pembangunan tersebut hanyalah proses pemindahan kekayaan secara legal dari yang lemah kepada yang kuat.

Solusinya terletak pada perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Dengan mendengarkan suara mereka yang terpinggirkan, negara tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga membangun rasa memiliki dan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasinya sendiri.

Membaca Arah Rupiah

Apakah APBN 2026 Sudah Berpihak pada Wong Cilik?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dokumen moral paling jujur dari sebuah pemerintahan. Menyongsong tahun 2026, tantangan fiskal Indonesia berada di titik krusial: mengelola transisi kepemimpinan sembari menjaga keberlanjutan perlindungan sosial bagi jutaan rakyat yang masih berada di garis kerentanan ekonomi.

Anggaran pendidikan yang menyentuh angka fantastis Rp608,3 triliun (20% APBN) adalah komitmen luar biasa, namun efektivitasnya terus dipertanyakan. Skor PISA yang stagnan menunjukkan kehadiran negara melalui rupiah seringkali bocor dalam birokrasi panjang dan inefisiensi pengadaan barang yang tidak berdampak langsung pada kualitas hasil belajar siswa.

Di sektor perlindungan sosial, alokasi Rp479,1 triliun adalah "jaring pengaman" yang krusial. Program PKH dan PIP terbukti menurunkan angka kemiskinan nasional hingga 3,2% setiap penyaluran Rp100 triliun. Namun, hantu ketidakakuratan data (DTKS) masih menyebabkan fenomena bantuan tidak tepat sasaran yang melukai rasa keadilan.

Kebocoran anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, tapi nyawa rakyat yang tidak terselamatkan karena obat langka di puskesmas. Kasus korupsi di sektor sumber daya alam menunjukkan potensi pendapatan negara yang hilang dalam jumlah masif. Anggaran yang hilang tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk subsidi pupuk tepat sasaran bagi petani kecil. Revolusi APBN 2026 harus dimulai dari transparansi total berbasis digital. Pengawasan anggaran harus melibatkan publik secara luas melalui platform yang mudah diakses. Setiap rupiah yang keluar harus dapat dilacak dampaknya melalui indikator kinerja yang jelas, bukan sekadar selesai secara administratif namun mangkrak secara fungsi di lapangan.

Beban utang negara mulai menyempitkan ruang gerak fiskal untuk belanja produktif. Kehadiran negara dalam mengelola utang haruslah bijaksana; utang harus digunakan untuk investasi SDM produktif, bukan sekadar untuk menambal inefisiensi birokrasi atau mendanai proyek mercusuar minim dampak ekonomi.

Reformasi perpajakan adalah kunci kemandirian, namun harus berkeadilan sosial. Jangan sampai instrumen pajak hanya menyasar kelas menengah yang patuh, sementara para elite pemilik modal mendapatkan berbagai tax holiday yang tidak sebanding dengan serapan tenaga kerja lokal yang mereka lakukan bagi masyarakat.

Subsidi energi adalah buah simalakama fiskal yang memerlukan keberanian politik. Transformasi subsidi dari barang ke orang (target sasaran) adalah solusi pahit yang harus ditempuh dengan data super akurat. Jika transisi ini gagal dikomunikasikan dengan jujur, ia hanya akan menimbulkan gejolak sosial yang kontraproduktif. Investasi pada gizi anak di 1000 hari pertama kehidupan (program stunting) memiliki tingkat pengembalian tertinggi bagi masa depan bangsa. APBN 2026 harus berani mengalihkan belanja konsumtif menjadi belanja investasi manusia yang bersifat jangka panjang untuk menjamin kualitas generasi emas Indonesia 2045.

Rakyat ingin melihat setiap rupiah pajak mereka kembali dalam bentuk kualitas layanan publik yang memanusiakan. Negara hadir ketika seorang ibu di desa terpencil tidak perlu lagi khawatir soal biaya persalinan karena JKN yang berjalan sempurna. Dampak nyata adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti rakyat, dan itu dimulai dari anggaran yang ditulis dengan nurani.



Navigasi Akar Rumput: Desa Sebagai Subjek dan Ujian Program Makan Bergizi Gratis

Sejak lahirnya UU Desa, pusat gravitasi pembangunan Indonesia bergeser ke pedesaan. Desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah administratif terbawah, melainkan sebagai subjek hukum mandiri yang berdaulat. Dana Desa triliunan rupiah adalah wujud kepercayaan negara pada kearifan lokal untuk memangkas birokrasi panjang yang seringkali menghambat kemajuan.

Namun, otonomi desa adalah panggung ujian bagi integritas kepemimpinan lokal. Fenomena elite capture di tingkat desa—di mana Dana Desa hanya dinikmati lingkar kekuasaan perangkat desa—masih menjadi kerikil dalam pembangunan. Kehadiran negara di desa harus diperkuat melalui sistem pengawasan partisipatif komunitas yang transparan dan akuntabel.

Kini, ujian sesungguhnya dari keberpihakan negara adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan sekadar mengisi piring anak sekolah, melainkan rekayasa sosial-ekonomi yang masif. Jika dikelola tepat, MBG dapat menjadi mesin penggerak ekonomi desa melalui rantai pasok lokal yang melibatkan petani, peternak, dan nelayan desa lewat BUMDes.

Risiko besar mengintai jika terjadi sentralisasi pengadaan oleh korporasi besar. Jika bahan baku dikuasai raksasa bisnis melalui tender pusat, maka petani desa hanya kembali menjadi penonton dalam sirkulasi uang negara. Negara harus hadir dengan regulasi yang mewajibkan penyerapan produk lokal agar terjadi distribusi keadilan ekonomi yang merata hingga ke dapur warga.

Stunting adalah musuh mematikan masa depan yang memerlukan intervensi agresif. Meski angka stunting nasional menurun ke 21,5%, disparitas antarwilayah masih sangat menganga. Kehadiran negara di meja makan melalui program gizi gratis adalah langkah afirmatif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui perbaikan kualitas nutrisi otak sejak dini.

Otonomi ekonomi desa melalui BUMDes harus terus dipacu secara



profesional. Banyak BUMDes yang saat ini hanya papan nama karena kurangnya kompetensi manajerial dan inovasi. Kehadiran negara harus mewujud dalam bentuk pelatihan teknis dan akses pasar bagi produk unggulan desa, bukan sekadar memberikan modal mentah yang rawan terjadi penyimpangan.

Digitalisasi desa adalah kebutuhan mendesak untuk menutup celah pungutan liar dan birokrasi yang lambat. Desa melek digital akan lebih mudah memasarkan potensinya ke pasar global tanpa melalui rantai tengkulak yang panjang. Ini adalah wujud nyata dari "negara hadir" di genggaman tangan setiap warga desa melalui keterbukaan informasi publik.

Pembangunan fisik di desa harus seimbang antara infrastruktur ekonomi (jalan, pasar) dengan infrastruktur sosial (sanitasi, air bersih, perpustakaan). Kesejahteraan akar rumput terwujud ketika warga tidak perlu lagi urbanisasi ke kota besar untuk menyambung hidup karena di desanya sendiri harapan itu tumbuh subur melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Negara hadir ketika warga desa merasa bangga dengan identitas dan kearifan lokalnya. Program pemerintah harus menghormati local wisdom dan tidak memaksakan pola pembangunan kota yang asing ke desa. Kearifan lokal seringkali lebih efektif dalam menjaga kelestarian alam dibandingkan teori pembangunan impor yang tidak kontekstual.

Sebagai penutup, wajah asli Indonesia adalah wajah pedesaan. Program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa adalah dua instrumen utama yang harus dikawal dengan penuh integritas. Negara hadir bukan sebagai pemberi sedekah, tapi sebagai fasilitator yang membuka jalan kemandirian rakyat. Kedaulatan bangsa ini bermula dari kemakmuran yang dirasakan di setiap meja makan warga desa.

DATA & FAKTA:

Menakar

Kehadiran Negara dalam Angka

IPM Nasional 2024

75,02

Kategori Tinggi,
Naik 0,85%

Kesehatan

21,5%

Posisi Angka
Stunting nasional





Rasio Gini Ketimpangan

0,379
Nasional

0,306
Pedesaan

Anggaran 2023

Rp608,3T
Pendidikan

Rp479,1T
Kesehatan

Pendidikan

8,85 Tahun
Rata-rata lama sekolah

Setara
Kelas 9 SMP

Skor IPK Korupsi

34 Skor IPK stagnan

Asset Recovery
hanya ~13%

(Data ICW).S12:03 PM 2/14/2026



Menakar
Kehadiran Negara dalam Angka

Indikator	Maret 2023	Maret 2024	Sept 2024
Rasio Gini Nasional	0,388	0,379	0,381
Rasio Gini Perkotaan	0,409	0,399	0,402
Rasio Gini Perdesaan	0,313	0,306	0,308
Pangsa Pengeluaran 40% Terbawah	18,12%	18,45%	18,41%

Komponen IPM Indonesia

Komponen	2023	2024	Pertumbu-han (%)
Indeks Pem-bangunan Manusia (IPM)	74,39	75,02	0,85
Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,93	74,15	0,30
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,15	13,21	0,46
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,77	8,85	0,91
Pengeluaran Riil per Kapita (Rp Juta)	11,90	12,34	3,71

DEPUTI PENGAWASAN & MONITORING BP3U DPP PKS
Dr. Agung Budi Margono, ST., MT

Dari Janji Kampanye ke KPI Kinerja

Membangun Dashboard Dampak Pejabat Publik

Janji politik bukan sekadar rangkaian kalimat saat kampanye. Ia adalah kontrak moral yang disaksikan publik. Masalahnya, dalam praktik politik kita, janji sering berhenti sebagai narasi. Ia menginspirasi, tetapi tidak selalu terukur. Ia membangkitkan harapan, tetapi sulit dievaluasi.

Jika kita sungguh ingin menghadirkan negara yang nyata bagi rakyat, maka janji harus diturunkan menjadi indikator. Dari visi ke program. Dari program ke ukuran kinerja. Dari ukuran kinerja ke dampak yang bisa dirasakan.

Di titik inilah pengawasan dan monitoring menemukan maknanya yang paling substantif.

Janji yang Diterjemahkan, Bukan Ditinggalkan

Ambil contoh sederhana. "Menguatkan UMKM."

Kalimat ini terdengar kuat. Namun tanpa indikator, ia menjadi elastis—bisa ditafsirkan ke mana saja.

Menguatkan UMKM seharusnya berarti: Berapa jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan?
Apakah omzet mereka meningkat?
Apakah angka usaha yang tutup menurun? Apakah kebijakan fiskal benar-benar memudahkan, bukan

mempersulit?

Demikian pula janji tentang pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, atau pengentasan kemiskinan. Setiap janji harus memiliki angka rujukan. Setiap visi harus memiliki target yang bisa dipantau.

Janji yang tidak diukur, lambat laun akan dilupakan.

Dari Aktivitas ke Dampak

Sering kali kinerja pejabat publik diukur dari aktivitas: berapa perda disahkan, berapa rapat dihadiri, berapa kunjungan kerja dilakukan. Ukuran-ukuran ini memang penting, tetapi baru menyentuh sisi administratif.

Yang lebih penting adalah pertanyaan berikutnya: Apakah regulasi itu memperbaiki keadaan? Apakah anggaran itu mengurangi ketimpangan? Apakah pengawasan itu menyelamatkan kepentingan rakyat?

Perlu pergeseran paradigma: dari output oriented menuju impact oriented.

Regulasi bukan sekadar produk hukum. Ia harus menjadi instrumen perubahan.

Anggaran bukan sekadar angka. Ia harus menjadi solusi konkret.

Pengawasan bukan sekadar fungsi formal. Ia harus mencegah kerugian publik.

Tanpa pergeseran ini, kehadiran negara akan terasa administratif, bukan substantif.

Membangun Dashboard Dampak

Untuk memastikan keterhubungan antara janji dan hasil, diperlukan instrumen yang sistematis. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pembangunan dashboard dampak pejabat publik.

Dashboard ini setidaknya memuat empat dimensi utama:

1. Legislasi yang Berpihak

Bukan hanya jumlah regulasi, tetapi kualitas keberpihakannya.

Apakah regulasi memperkuat kelompok rentan? Apakah ia membuka akses atau justru menambah beban?

2. Anggaran yang Produktif

Seberapa besar anggaran dialokasikan untuk sektor strategis?

Bagaimana efektivitas belanja publik terhadap indikator kesejahteraan?

Indeks Pembangunan Manusia, rasio gini, tingkat kemiskinan, angka stunting, akses layanan dasar—semua itu bukan sekadar statistik. Ia adalah cermin keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

3. Pengawasan yang Korektif
Apakah temuan pengawasan ditindak-lanjuti? Apakah ada perbaikan sistem setelah evaluasi dilakukan?

4. Relasi dengan Konstituen
Seberapa responsif terhadap aspirasi? Apakah ada mekanisme umpan balik yang jelas?

Instrumen semacam ini bukan untuk memberi label "baik" atau "buruk", melainkan untuk menjaga arah. Agar kerja politik tidak melenceng dari mandat awalnya.

Pendekatan Berimbang: Politik, Tata Kelola, dan Integritas
Dalam dunia korporasi dikenal konsep Balanced Scorecard. Dalam konteks pejabat publik, pendekatan berimbang juga relevan.

Kinerja tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. la harus mencakup:

Dampak sosial, apakah kebijakan memperbaiki indikator kesejahteraan?

Proses tata kelola, apakah dijalankan secara transparan dan akuntabel?

Integritas pribadi, apakah menjaga etika dan menghindari konflik kepentingan?

Kepercayaan publik, apakah masyarakat merasa dilayani?

Keseimbangan ini penting. Politik tanpa integritas akan rapuh.
Kebijakan tanpa pengawasan akan bias.
Program tanpa evaluasi akan stagnan.

Ketika ada persoalan distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, maka langkahnya bukan sekadar mengkritik, tetapi memastikan sistem diperbaiki. Mengawal evaluasi. Mengusulkan perbaikan mekanisme. Memantau hasilnya.

Data sebagai Penjaga Objektivitas
Dalam konteks kebijakan publik, opini tidak cukup. Data menjadi fondasi.

Indeks Pembangunan Manusia, rasio gini, tingkat kemiskinan, angka stunting, akses layanan dasar—semua itu bukan sekadar statistik. la adalah cermin keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Ketika seorang pejabat memperjuangkan kebijakan pendidikan, maka indikator kualitas pendidikan harus membaik.

Ketika berbicara tentang ketahanan keluarga, maka indikator kesejahteraan keluarga harus meningkat.

Tanpa rujukan data, evaluasi mudah terjebak pada pembenaran.

Sistem Pelaporan dan Alarm Dini
Instrumen pengawasan yang baik membutuhkan ritme. Pelaporan berkala menjadi penting agar arah tetap terjaga.



Tidak harus rumit, tetapi konsisten.

Selain itu, perlu mekanisme alarm dini terhadap potensi penyimpangan. Konflik kepentingan, gaya hidup yang tidak proporsional, atau pola pengambilan keputusan yang tidak transparan harus bisa terdeteksi lebih awal.

Pengawasan bukanlah tindakan represif. Ia adalah sistem penjaga agar amanah tetap berada pada jalurnya.

Menghubungkan Aspirasi dengan Kebijakan

Kehadiran negara sering kali diuji pada level paling konkret: apakah keluhan warga direspons? Apakah aspirasi benar-benar diolah menjadi kebijakan?

Ketika ada persoalan distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, maka langkahnya bukan sekadar mengkritik, tetapi memastikan sistem diperbaiki. Mengawal evaluasi. Mengusulkan perbaikan mekanisme. Memantau hasilnya.

Di titik itulah pengawasan menjadi bermakna. Ia tidak berhenti pada laporan, tetapi berujung pada perubahan.

Negara yang Hadir Itu Terukur

Negara yang hadir bukan negara yang paling banyak berbicara, tetapi yang paling konsisten mengukur dirinya.

Janji yang diterjemahkan menjadi indikator. Indikator yang dimonitor secara disiplin. Monitoring yang melahirkan perbaikan.

Politik pelayanan membutuhkan kedewasaan sistem. Tanpa ukuran, kerja mudah bias. Tanpa evaluasi, kebijakan mudah stagnan.

Pada akhirnya, yang dinilai bukanlah seberapa indah narasi disampaikan, tetapi seberapa nyata dampak dirasakan.

Dan di situlah janji menemukan maknanya yang sejati.

DEPUTI DATA DAN PERENCANAAN BP3U DPP PKS
dr. Helmi Budiman MM.

Akuntabilitas Berbasis Data:

Jalan Kepemimpinan Pejabat Publik PKS yang Bermartabat



Seorang pejabat publik PKS sejatinya tidak sedang mengelola program tetapi sedang mengelola kepercayaan. Kepercayaan publik tidak dibangun oleh retorika, melainkan oleh konsistensi antara janji, kerja, dan hasil. Dalam konteks itulah akuntabilitas berbasis data menjadi bukan sekadar instrumen teknokratis, tetapi fondasi moral kepemimpinan.

Kita hidup di era ketika masyarakat semakin cerdas, informasi terbuka, dan ruang kritik tak lagi bisa dibatasi. Pemerintahan yang tidak mampu membuktikan kinerjanya secara terukur akan perlahan kehilangan legitimasi, meskipun secara administratif tampak tertib.

Dari Kekuasaan Administratif Menuju Kepemimpinan Berbasis Bukti Reformasi birokrasi Indonesia telah menempatkan akuntabilitas sebagai pilar utama, salah satunya melalui

"Dalam kepemimpinan publik, tidak ada kehormatan yang lebih tinggi selain mampu berkata dengan jujur: “Inilah yang kami rencanakan, inilah yang kami capai, inilah yang belum berhasil dan inilah perbaikan yang kami lakukan untuk umat, Masyarakat, bang dan negara.” Itulah akuntabilitas pejabat public PKS yang bermartabat. Itulah kepemimpinan pejabat public PKS yang layak dikenang."

kerangka yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan instrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Secara desain, sistem SAKIP telah menghubungkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun sistem, sebaik apa pun dirancang, tidak otomatis melahirkan budaya.

Di sinilah tantangan strategis seorang negarawan birokrasi pejabat public PKS dengan berani menggeser orientasi aparatur dari “menyelesaikan kegiatan” menjadi “menghasilkan dampak.” Dari kepatuhan administratif menuju kepemimpinan berbasis bukti (evidence-based leadership). Akuntabilitas berbasis data berarti keberanian untuk menjawab pertanyaan paling mendasar, apakah kebijakan ini benar-benar menyelesaikan masalah publik?, Apakah anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat? Apakah indikator keberhasilan kita merepresentasikan perubahan nyata atau sekadar angka kosmetik?

Dalam perspektif strategis, data bukan hanya alat ukur. Data adalah cermin. Data yang jujur memaksa organisasi melihat dirinya apa adanya—termasuk kelemahan, kegagalan, dan ketidakefisienan. Banyak organisasi mampu memproduksi laporan, tetapi tidak semua berani membaca maknanya.

Akuntabilitas berbasis data mensyaratkan tiga keberanian kepemimpinan pejabat public PKS yaitu:

1. Keberanian Mengukur yang Esensial, bukan hanya output, tetapi outcome dan dampak.
2. Keberanian Mengakui Kekurangan dengan evaluasi bukan panggung pembenaran, melainkan ruang pembelajaran.
3. Keberanian Mengoreksi Kebijakan dengan data harus memandu perubahan, bukan sekadar menghiasi presentasi.

Di sinilah perbedaan antara

administrator dan negarawan. Administrator memastikan prosedur berjalan. Negarawan memastikan tujuan tercapai.

Dalam konteks pembangunan nasional, evaluasi terukur adalah alat menjaga kesinambungan kebijakan. Tanpa indikator yang jelas dan terstandar, setiap pergantian kepemimpinan berpotensi memulai dari nol. Evaluasi yang terukur dan terdokumentasi dengan baik menciptakan memori institusional. Ia menjaga arah pembangunan tetap konsisten meski aktor berganti. Evaluasi terukur menciptakan rasionalitas dalam pengambilan keputusan anggaran. Dalam situasi fiskal yang terbatas, setiap rupiah harus memiliki justifikasi berbasis data. Tanpa itu, kebijakan mudah terseret oleh tekanan populisme atau kepentingan jangka pendek.

Akuntabilitas berbasis data pada akhirnya adalah strategi menjaga negara dari keputusan impulsif.

Membangun Budaya, Bukan Sekadar Dashboard Banyak institusi telah memiliki aplikasi, dashboard kinerja, dan sistem pelaporan digital. Namun teknologi tidak otomatis menghadirkan akuntabilitas. Akuntabilitas lahir ketika pejabat public PKS memulai rapat dengan data bukan opini, setiap program dirancang dengan indikator dampak sejak awal dan kegagalan diperlakukan sebagai bahan perbaikan, bukan bahan saling menyalahkan.

Aparatur memahami bahwa angka yang mereka laporkan berimplikasi pada kehidupan nyata masyarakat. Budaya inilah yang harus dibangun dalam pembinaan pejabat publik. Karena pada akhirnya, sistem bisa direplikasi, tetapi karakter kepemimpinan harus ditumbuhkan. Seorang pejabat public PKS boleh saja menyelesaikan masa jabatannya dengan proyek-proyek fisik yang terlihat. Namun yang lebih penting adalah apakah pejabat public PKS meninggalkan sistem pengukuran yang membuat organisasi terus membaik setelah dirinya tidak lagi menjabat.

Pejabat Publik PKS memastikan bahwa pembangunan tidak bergantung pada figur, tetapi pada sistem yang rasional dan terukur. Pejabat Publik PKS menjaga agar negara berjalan bukan karena kehendak personal, tetapi karena komitmen pada tujuan bersama. Pada titik ini, akuntabilitas bukan lagi sekadar kewajiban regulatif.

Akuntabilitas adalah ekspresi tanggung jawab moral kepada rakyat. Dalam kepemimpinan publik, tidak ada kehormatan yang lebih tinggi selain mampu berkata dengan jujur: “Inilah yang kami rencanakan, inilah yang kami capai, inilah yang belum berhasil dan inilah perbaikan yang kami lakukan untuk umat, Masyarakat, bang dan negara.” Itulah akuntabilitas pejabat public PKS yang bermartabat. Itulah kepemimpinan pejabat public PKS yang layak dikenang.



4

Webinar Nasional: Integritas Tanpa Kompromi

Honey Trap

Jerat Asmara di Kursi Kuasa dan Erosi Integritas Pejabat Kita

Baru-baru ini, panggung global kembali diguncang oleh terbukanya tabir gelap dari ribuan halaman "Dokumen Epstein". Nama-nama pesohor, politisi, hingga tokoh kelas dunia terseret dalam pusaran skandal yang menyerupai labirin tanpa ujung. Kasus Jeffrey Epstein bukan sekadar cerita kriminal biasa; ia adalah pengingat pahit tentang betapa mangkusnya asmara dan eksploitasi seksual dijadikan alat sandera bagi mereka yang berada di puncak kuasa. Isu honey trap—yang lama dianggap sekadar bumbu novel spionase—kini mencuat kembali sebagai ancaman nyata yang sangat purba sekaligus canggih.

Integritas pejabat publik sejatinya adalah napas bagi tegaknya negara hukum dan benteng keamanan nasional. Namun, lembar sejarah Indonesia modern bercerita lain. Integritas itu berkali-kali dihantam oleh "peluru halus" bernama honey trap atau jebakan kasih sayang. Ini bukan sekadar skandal moral di balik pintu kamar, melainkan sebuah metode manipulatif sistematis. Daya tarik seksual dan romansa dipoles sedemikian rupa untuk

TABEL 1 **Membedah Dimensi Sosiologis Honey Trap**

Dimensi Sosiologis	Dampak terhadap Integritas	Dimensi Sosiologis
Budaya Patriarki	Objektifikasi perempuan sebagai alat suap	Normalisasi perilaku amoral dalam birokrasi
Relasi Kuasa Asimetris	Eksploitasi kelompok rentan oleh pejabat	Hilangnya kepercayaan publik pada keadilan
Tabu Seksualitas	Minimnya laporan karena rasa malu	Terbentuknya lingkaran impunitas pelaku
Simbol Status	Seks sebagai bukti sukses maskulin	Karakter pejabat yang mudah dikompromikan

menjerat target demi segudang kepentingan: informasi rahasia, akses kekuasaan, hingga pundi-pundi finansial. Secara sosiologis, honey trap menari di atas timpangnya relasi kuasa. Secara politis, ia adalah senjata pemusnah karakter yang mampu meruntuhkan legitimasi pemimpin sekuat apa pun dalam sekejap mata.

CERMIN RETAK SOSIOLOGI: PATRIARKI DAN SYAHWAT KEKUASAAN

Mengapa pejabat publik kita begitu rapuh di hadapan jebakan asmara? Jawabannya berakar pada struktur sosiologis kita yang masih kental dengan napas patriarki. Dalam kacamata ini, perempuan sering kali masih dipandang sebagai objek pelengkap atau instrumen dalam transaksi kekuasaan pria. Korupsi di Indonesia punya wajah maskulin yang nyata; kekuasaan sering kali mencari validasi lewat akses terhadap perempuan sebagai simbol kasta sosial dan keberhasilan politik.

Ketimpangan inilah yang menjadi celah empuk bagi rekayasa sosial (social engineering). Pejabat yang merasa memiliki "kekebalan moral" karena otoritasnya sering kali lengah saat pihak luar masuk lewat celah keintiman. Mengutip Michel Foucault, kontrol terhadap tubuh dan seksualitas di sini menjadi instrumen untuk menundukkan individu ke dalam struktur kendali pihak lain. Data bicara pahit: Indonesia berada di titik nadir dalam urusan sekstorsi (pemerasan seksual). Global Corruption Barometer 2020 menempatkan negeri ini di urutan pertama di Asia dengan prevalensi mencapai 18 persen. Di sini, layanan seksual menjadi "mata uang" untuk mendapatkan layanan publik atau keputusan administratif.

Sayangnya, seks masih dianggap domain privat yang tabu. Alhasil, penjebakan seksual sering dianggap masalah moral individu, bukan korupsi sistemik. Pejabat yang terjerat lebih memilih bungkam dan tunduk pada pemerasan daripada melaporkan kejadiannya—sebuah kompromi fatal bagi rahasia negara.

"Integritas pejabat publik sejatinya adalah napas bagi tegaknya negara hukum dan benteng keamanan nasional. Namun, lembar sejarah Indonesia modern bercerita lain. Integritas itu berkali-kali dihantam oleh 'peluru halus' bernama honey trap atau jebakan kasih sayang. Ini bukan sekadar skandal moral di balik pintu kamar, melainkan sebuah metode manipulatif sistematis."

TABEL 2 **Pertarungan Intelijen di Era Sukarno**

Aktor Intelijen	Metode Serangan	Tujuan Strategis	Hasil Operasi
KGB (Soviet)	Rekaman video seks asli	Pemerasan politik dan kontrol kebijakan	**Gagal;** Sukarno justru minta salinan video
CIA (AS)	Produksi film porno palsu	Delegitimasi moral dan pemicu kudeta	**Gagal;** tidak didukung massa
MI6 (Inggris)	Propaganda & rumor perselingkuhan	Melemahkan posisi tawar internasional	Stigma negatif jangka panjang

FLASHBACK PERANG DINGIN: DIPLOMASI KAMAR ALA SUKARNO

Sejarah mencatat Sukarno sebagai target utama operasi intelijen dua blok besar dunia. Karisma maskulin sang proklamator dianggap sebagai "tumit Achilles" yang bisa dieksploitasi demi kepentingan geopolitik.

KGB Uni Soviet pernah mencoba operasi honey pot saat Sukarno berkunjung ke Moskow. Mereka mengirimkan sekelompok perempuan cantik yang menyamar sebagai pramugari untuk melayani sang Presiden di hotel. Seluruh pertemuan direkam secara rahasia dengan kamera tersembunyi. Tujuannya: memeras Sukarno agar mengubah haluan politik luar negerinya menjadi pro-Soviet. Namun, KGB miskalkulasi secara sosiologis. Sukarno, alih-alih merasa terancam, justru menanggapi dengan tawa dan meminta salinan rekaman tersebut sebagai koleksi pribadi. Senjata pemeras itu tumpul seketika di tangan seorang pemimpin yang menolak dipenjara oleh rasa malu.

Tak mau kalah, CIA memproduksi film porno palsu menggunakan aktor yang memiliki kemiripan fisik dengan Sukarno. Film ini dimaksudkan untuk memicu revolusi moral di Indonesia yang konservatif. Namun, narasi ini gagal total karena rakyat melihat Sukarno sebagai bapak bangsa yang melampaui moralitas privat individu. Meski gagal secara fisik, rumor-rumor ini terus diembuskan media Barat untuk mendiskreditkan kebijakan politik bebas-aktif Indonesia di panggung diplomasi internasional.

ORDE BARU: PEREMPUAN DALAM CENGKERAMAN STRUKTUR MILITERISTIK

Di masa Suharto, integritas pejabat publik dijaga melalui struktur militeristik yang kaku. Penggunaan perempuan bergeser dari spionase global menjadi alat kontrol domestik dan penindasan politik. Perempuan sering dijadikan "umpan" dalam sebuah sistem kekerasan yang tertata rapi.

5 KASUS BESAR "DIPLOMASI RANJANG" ERA ORBA

1. **Penjebakan Oposisi di Kamar Hotel:** Intelijen rezim kerap mengatur skenario jebakan asmara terhadap tokoh-tokoh partai non-pemerintah (PDI/PPP). Mereka digiring ke hotel mewah, lalu situasi asusila direkam secara rahasia. Rekaman ini menjadi "kartu mati" yang memaksa mereka mendukung kebijakan fusi partai atau mundur perlahan dari panggung politik demi menghindari kehancuran nama baik.
2. **Srikandi Ali Moertopo** (Opsus): Operasi Khusus (Opsus) di bawah komando Ali Moertopo memiliki unit khusus bernama "Srikandi". Mereka terdiri dari sosialita dan pramugari yang direkrut sebagai agen. Tugas mereka adalah mendekati diplomat asing atau tokoh kritis dalam suasana romantis, mencuri informasi, dan menciptakan situasi kompromat guna menjamin kesetiaan tokoh tersebut pada rezim.
3. **Surveilans Moral Petisi 50:** Para pengkritik keras seperti Ali Sadikin dan H.R. Dharsono tak luput dari pengintaian detail. Intelijen giat melakukan profiling moral, mencari celah hubungan asmara di luar nikah atau skandal keluarga sebagai amunisi untuk melakukan pembunuhan karakter jika mereka terlalu vokal mengkritik Suharto.
4. **Infiltrasi 'Cewek Intel' di Kampus**: Menghadapi aktivisme mahasiswa tahun 80-an yang militan, aparat mengirim agen perempuan muda untuk masuk ke lingkaran aktivis. Mereka menjalin hubungan romantis guna memantau pergerakan dari dalam, melemahkan fokus perjuangan, hingga sengaja menciptakan konflik asmara antar-aktivis untuk menghancurkan soliditas organisasi.
5. **Politik 'Recall' Berbasis Isu Moral**: Di lembaga legislatif, isu moral menjadi senjata pembersihan politik. Anggota DPR yang dianggap membangkang akan dijebak dalam skandal asmara yang sudah diatur. Begitu bukti terkumpul, rezim akan melakukan recall (pemberhentian) dengan dalih menjaga "citra moral" lembaga, padahal intinya adalah mendepak suara-suara sumbang.

"Mengapa pejabat publik kita begitu rapuh di hadapan jebakan asmara? Jawabannya berakar pada struktur sosio-logis kita yang masih kental dengan napas patriarki. Dalam kacamata ini, perempuan sering kali masih dipandang sebagai objek pelengkap atau instrumen dalam transaksi kekuasaan pria."

ERA REFORMASI: KETIKA SEKS MENJADI "MATA UANG" KORUPSI

Demokrasi pasca-1998 ternyata tak lantas menyapu bersih praktik kotor ini. Honey trap berevolusi menjadi gratifikasi seksual—instrumen pelicin untuk tender proyek hingga pengamanan perkara. Seks kini menjadi "bonus" yang menciptakan ikatan emosional dan utang budi yang jauh lebih mengikat daripada sekadar transaksi finansial.

Ritual Jumat seorang Hakim di PN Bandung (2013): Inilah kasus paling vulgar dalam sejarah peradilan kita. Hakim ini terbukti meminta fasilitas layanan seksual setiap hari Jumat sebagai bagian dari kesepakatan suap perkara korupsi Bansos. Seks bukan lagi sekadar godaan, melainkan "pelicin" birokrasi hukum yang dianggap normal dalam lingkaran tertentu.

Perantara skandal kuota impor sebagai 'Mastermind' (2013): Dalam skandal kuota impor daging sapi, seorang perantara muncul bukan sekadar makelar, melainkan "Agen Pelaksana Honey Trap". Ia diduga menggunakan jaringan model dan artis untuk menjerat integritas para pengambil kebijakan. Kehadiran para perempuan ini dirancang untuk menciptakan kedekatan personal yang mengompromikan kewarasan profesional pejabat dalam mengambil keputusan strategis.

Narapidana korupsi dan plesiran hotel lapas (2018): Seorang narapidana kasus korupsi ketahuan menyuap sipir agar bisa izin keluar Lapas Sukamiskin. Alih-alih berobat, ia justru menginap di sebuah hotel bersama seorang artis muda. Kasus ini menelanjangi betapa daya tarik seksual mampu melumpuhkan seluruh sistem pengawasan penjara yang paling ketat sekalipun.

OTT mantan Hakim Mahkamah Konstitusi dan distraksi asmara (2017): Seorang Hakim Mahkamah Konstitusi diciduk KPK saat sedang bersama seorang wanita muda di sebuah pusat perbelanjaan. Meski wanita tersebut tidak terseret hukum, kehadirannya di tengah transaksi gelap menunjukkan bagaimana figur otoritas sering kali kehilangan kewaspadaan dan insting keamanan profesionalnya akibat distraksi romansa pihak ketiga.

Lobi karaoke dalam sengketa Pilkada (2013): Persidangan mengungkap bahwa ruang hiburan malam dan "layanan pendamping" menjadi ruang "netral" di mana lobi-lobi perkara Pilkada kelas berat dilakukan. Lingkungan yang memfasilitasi interaksi seksual ini menjadi tempat di mana pertahanan moral pejabat paling mudah runtuh dan transaksi korupsi paling lancar dilakukan.



FRONTIER DIGITAL: MENGHADAPI PASUKAN DEEPFAKE DAN POST-TRUTH

Ancaman hari ini telah berpindah ke ujung jari. Honey trap bukan lagi soal pertemuan fisik, melainkan perang hibrida di jagat maya yang memanfaatkan Kecerdasan Buatan (AI) untuk eksploitasi psikologis.

3 Kasus Jerat Digital Paling Valid

1. **Misteri Katie Jones** (2019): Sebuah profil LinkedIn bernama "Katie Jones" yang cantik dan cerdas berhasil berjejaring dengan banyak pakar kebijakan luar negeri dan pejabat tinggi AS. Investigasi mengungkap bahwa Katie Jones tidak pernah ada. Fotonya adalah hasil olahan AI (StyleGAN). Ini adalah

TABEL 3 **Komponen Ancaman Digital**

Komponen Digital	Mekanisme Serangan	Dampak Strategis
Deepfake AI	Video/audio asusila sintetis	Bukti palsu yang sulit dibantah
Social Profiling	Data medsos untuk target	Pendekatan personal yang akurat
Post-Truth	Amplifikasi algoritma	Erosi kepercayaan pada negara
Perang Hibrida	Akun bot untuk viralitas	Lumpuhnya pengambilan kebijakan

TABEL 4 **Level Mitigasi Strategis**

Komponen Digital	Tindakan Spesifik	Tujuan Utama
Individu	Batasi data pribadi & biometrik	Mencegah profiling & deepfake
Institusional	Pelatihan rekayasa sosial	Meningkatkan imunitas manipulasi
Teknologis	MFA & AI Forensik	Melindungi integritas data
Regulasi	Reformasi UU Tipikor	Menutup celah suap seksual

peringatan bahwa wajah-wajah sintetis kini digunakan untuk membangun kepercayaan visual sebelum operasi spionase dimulai.

2. **Operasi Suara Hamas** (2020): Hamas merayu tentara Israel menggunakan profil media sosial palsu. Hebatnya, mereka menggunakan teknologi pengubah suara untuk melakukan panggilan telepon, meyakinkan target melalui suara wanita yang nyata. Begitu jatuh cinta, target dipaksa mengunduh aplikasi "khusus" yang ternyata berisi spyware untuk mencuri data militer.
3. **Teror Deepfake di Asia** (2023-2024): Maraknya pemerasan seksual massal (Sextortion) yang menargetkan figur otoritas di India dan Korea Selatan. Penyerang menggunakan foto profil pejabat, lalu dengan AI, menempelkannya

Mengapa pejabat publik kita begitu rapuh di hadapan jebakan asmara? Jawabannya berakar pada struktur sosiologis kita yang masih kental dengan napas patriarki. Dalam kacamata ini, perempuan sering kali masih dipandang sebagai objek pelengkap atau instrumen dalam transaksi kekuasaan pria. Korupsi di Indonesia punya wajah maskulin yang nyata; kekuasaan sering kali mencari validasi lewat akses terhadap perempuan sebagai simbol kasta sosial dan keberhasilan politik.

pada video asusila sintetis yang tampak sangat nyata. Ini adalah ancaman kompromat jenis baru yang tidak memerlukan kehadiran fisik target sama sekali.

7 Kasus Honey Trap Paling Epik di Dunia

Sejarah intelijen internasional mencatat kisah-kisah luar biasa tentang bagaimana asmara digunakan untuk mengubah peta dunia:

1. **Mata Hari (Margaretha Geertruida MacLeod)**: Penari eksotis Belanda yang menjadi mata-mata ganda untuk Prancis dan Jerman di PD I. Ia dieksekusi mati oleh Prancis, meski hingga kini status aslinya sebagai agen masih diperdebatkan. Ia adalah simbol awal bagaimana kecantikan bisa menjadi senjata yang mematikan.
2. **The Profumo Affair (Christine Keeler, 1963)**: Menteri Pertahanan Inggris John Profumo menjalin hubungan dengan Keeler yang ternyata juga dekat dengan atase militer Soviet. Skandal ini menghancurkan karir Profumo dan menjatuhkan seluruh pemerintahan Inggris setahun kemudian akibat risiko keamanan nasional yang fatal.
3. **Mordechai Vanunu & "Cindy" (1986)**: Vanunu, teknisi nuklir Israel, membocorkan rahasia senjata nuklir ke media Inggris. Mossad mengirim agen "Cindy" yang merayunya di London dan membawanya ke Roma untuk berlibur, di mana ia diculik dan dibawa kembali ke Israel dalam kondisi dibius untuk diadili.
4. **Bernard Boursicot & Shi Pei Pu (1964-1983)**: Seorang diplomat Prancis jatuh cinta pada penyanyi opera Tiongkok, Shi Pei Pu, dan menyerahkan dokumen rahasia selama bertahun-tahun demi "cinta". Fakta unik: Baru di pengadilan Boursicot menyadari bahwa kekasihnya selama 20 tahun itu sebenarnya adalah seorang laki-laki.
5. **Clayton Lonetree (1980-an)**: Marinir AS pertama yang dihukum spionase karena jatuh cinta pada agen KGB, Violetta Seina, saat bertugas menjaga Kedubes AS di Moskow. Ia menyerahkan denah kedutaan hanya karena manipuasi emosional.
6. **Sir Geoffrey Harrison (1968)**: Duta Besar Inggris untuk Moskow dijebak KGB lewat asisten rumah tangga cantik bernama Galya. Alih-alih tunduk pada pemerasan lewat rekaman asusila, Harrison langsung melapor ke London. Ia ditarik pulang, namun integritasnya tetap terjaga meski karirnya berakhir.
7. **Anna Chapman (2010)**: Anggota "Sleeper Agent" Rusia di AS yang tertangkap FBI. Ia menggunakan pesona sosialnya untuk masuk ke lingkaran elit New York. Setelah dideportasi, ia justru menjadi selebriti besar di Rusia, menunjukkan sisi modern dari agen honey trap.

5

Advokasi Aleg PKS dan Jejak Perjuangan Legislasi

Mengetuk Pintu Keadilan:
Suara Parlemen untuk Hak Rakyat



Di koridor gedung kura-kura Senayan yang sunyi, di balik tumpukan draf undang-undang yang tebal, ada detak jantung aspirasi yang seringkali terlupakan oleh keriuhan politik permukaan. Bagi Fraksi PKS, legislasi bukanlah sekadar deretan pasal yang kaku dan dingin, melainkan sebuah ikhtiar spiritual untuk menerjemahkan doa-doa rakyat menjadi kebijakan yang mengikat. Visi Masyarakat Madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat menjadi bintang penunjuk arah bagi para Aleg PKS dalam menavigasi setiap perdebatan anggaran di ruang komisi.

Kehadiran negara di ruang parlemen diwujudkan melalui keberpihakan yang tak tawar-menawar terhadap kelompok rentan. Salah satu suara yang paling konsisten terdengar adalah dari Kurniasih Mufidayati. Sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, ia terus menagih janji negara agar Bantuan

Sosial (Bansos) tidak hanya bersifat karitatif atau sementara. Baginya, bantuan sosial harus berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem jaminan sosial yang mampu memandirikan rakyat, bukan sekadar "obat penenang" saat harga pangan melambung tinggi.

Advokasi Kurniasih bukan tanpa dasar yang kokoh. Ia seringkali menekankan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, kelompok rentan seperti janda, lansia, dan penyandang disabilitas adalah pihak yang paling pertama terjatuh. Melalui berbagai forum legislasi, ia mendesak pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar setiap rupiah dari APBN benar-benar sampai ke pintu rumah mereka yang membutuhkan. Ini adalah bentukpolitik yang memiliki wajah manusiawi, di mana data statistik berubah menjadi harapan nyata.

Senada dengan itu, Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS juga mengambil peran sentral dalam isu ketahanan keluarga dan perlindungan anak. Ia melihat bahwa kegagalan negara dalam menghadirkan perlindungan pada level mikro—yakni keluarga—akan berdampak pada kerapuhan sosial di level makro. Netty seringkali menyuarakan pentingnya alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan, sebuah isu yang seringkali dianggap sebagai "urusan domestik" namun memiliki implikasi nasional.

> Legislasi bukanlah sekadar deretan pasal yang kaku dan dingin, melainkan sebuah ikhtiar spiritual untuk menerjemahkan doa-doa rakyat menjadi kebijakan yang mengikat

Bagi Netty, "Negara Hadir" berarti negara yang memberikan rasa aman sejak dari dalam rumah. Ia mengadvokasi berbagai kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan dan akses modal usaha mikro. Platform Masyarakat Madani yang ia perjuangkan menekankan bahwa kesejahteraan dimulai dari keluarga yang berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara moral. Inilah yang ia sebut sebagai politik pengabdian, di mana setiap kebijakan harus diuji keberpihakannya pada ketahanan keluarga Indonesia.

Tantangan di lapangan parlemen tentu tidak sederhana. Seringkali, advokasi humanis seperti ini berbenturan dengan logika efisiensi anggaran birokrasi yang dingin. Namun, para Aleg PKS tetap teguh pada prinsip bahwa manusia tidak boleh dikorbankan demi angka-angka fiskal semata. Mereka percaya bahwa pembangunan

"Di gedung parlemen itu, masih ada nurani yang terjaga untuk memastikan bahwa negara benar-benar hadir untuk melayani rakyat, bukan sekadar untuk melayani kepentingan elite."

yang sejati adalah pembangunan yang meletakkan manusia sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek administratif yang dipindah-pindahkan dalam tabel anggaran tahunan.

Suara-suara dari Senayan ini kemudian bergulir menjadi gerakan nyata di akar rumput. Advokasi yang dilakukan Kurniasih dan Netty bukan sekadar pidato di atas podium, melainkan instruksi kerja bagi struktur partai di seluruh daerah untuk mendampingi rakyat mendapatkan hak-haknya. Inilah wujud nyata dari politik yang menyambung, di mana aspirasi di tingkat paling bawah mendapatkan pengeras suara yang lantang di tingkat pengambilan kebijakan nasional.

Kehadiran negara juga berarti kemudahan akses layanan kesehatan bagi rakyat kecil. PKS melalui para Alegnya konsisten mengawal transformasi layanan kesehatan lewat JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Mereka mendesak agar tidak ada lagi warga yang ditolak oleh rumah sakit karena urusan administrasi yang berbelit atau status kepesertaan. Bagi PKS, kesehatan adalah hak asasi yang paling mendasar, dan negara wajib hadir tanpa kecuali bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.

Legislasi bagi PKS adalah jalan panjang yang penuh kerikil dan kompromi politik. Namun, bagi para Aleg ini, setiap keping undang-undang yang berhasil disahkan dengan keberpihakan pada rakyat adalah sebuah kemenangan kecil bagi keadilan sosial. Mereka menyadari bahwa kekuasaan hanyalah alat sementara, namun kebijakan yang adil dan memihak rakyat akan meninggalkan jejak pengabdian yang abadi bagi generasi mendatang.

Pada akhirnya, mengetuk pintu keadilan adalah tugas harian yang tidak pernah selesai. Di tengah dinamika politik yang seringkali transaksional, konsistensi Kurniasih Mufidayati, Netty Prasetiyani, dan Aleg PKS lainnya dalam membela hak-hak kelompok rentan memberikan oase harapan. Bahwa di gedung parlemen itu, masih ada nurani yang terjaga untuk memastikan bahwa negara benar-benar hadir untuk melayani rakyat, bukan sekadar untuk melayani kepentingan elite.

Di Balik Meja Perundingan:

Siasat Legislasi demi Dompet Rakyat

Politik anggaran seringkali digambarkan sebagai arena pertempuran tanpa dentuman senjata, namun dampaknya bisa terasa hingga ke meja makan setiap keluarga di pelosok negeri. Di balik meja-meja perundingan yang alot di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Anis Byarwati menjadi sosok yang vokal dalam memperjuangkan keadilan fiskal. Sebagai anggota Banggar dari Fraksi PKS, ia seringkali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pajak yang dianggap memberatkan rakyat kecil dan kelas menengah Indonesia.

Salah satu poin krusial yang ia advokasi secara konsisten adalah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Anis menekankan bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah tidak boleh terjebak pada asas pemungutan yang eksploitatif kepada warga. Ia mendesak agar regulasi pajak daerah tetap mengedepankan asas keadilan sosial dan tidak menciptakan beban ekonomi ganda bagi masyarakat. Baginya,



kedaulatan ekonomi rakyat harus dijaga dari kebijakan fiskal yang hanya mengejar target angka.

Kehadiran Anis Byarwati di meja perundingan membawa perspektif bahwa APBN harus menjadi mesin distribusi kesejahteraan, bukan sekadar alat akumulasi kekuasaan elite. Ia konsisten menuntut efisiensi belanja birokrasi dan mendesak dialihkannya anggaran non-produktif ke sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. "Setiap rupiah pajak rakyat harus kembali menjadi fasilitas publik yang berkualitas," tegasnya dalam berbagai kesempatan rapat. Ini adalah siasat legislasi yang terukur, berbasis data, dan memiliki orientasi kuat pada keadilan.

Di sektor energi dan sumber daya alam, Mulyanto (Saat Menjadi Aleg PKS DPR RI) menjadi penjaga gawang kebijakan yang sangat kritis. Ia adalah sosok yang paling lantang menyuarakan perlawanan terhadap praktik rent seeking (perburuan rente) yang menghisap kekayaan alam Indonesia secara ilegal. Mulyanto secara konsisten mengkritik kebijakan pertambangan yang seringkali hanya menguntungkan segelintir elite ekonomi namun meninggalkan kerusakan lingkungan dan kemiskinan yang dalam bagi warga lokal di sekitar tambang.

Advokasi Mulyanto melampaui sekadar retorika di media massa. Ia mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap tambang-tambang ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Langkah penindakan kebocoran di sektor SDA mendapatkan dukungan sekaligus pengawasan ketat darinya demi kedaulatan energi nasional. Baginya, kehadiran negara di sektor SDA harus diwujudkan dalam bentuk hilirisasi yang inklusif, bukan sekadar ekspor bahan mentah yang mengayakan pihak asing sementara rakyat tetap berada dalam kemiskinan.

Pertempuran legislasi yang paling simbolis saat ini adalah perjuangan Fraksi PKS dalam mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. PKS menjadi salah satu fraksi yang paling gigih memerintahkan kadernya di parlemen untuk mempercepat pembahasan undang-undang ini demi efek jera. Tanpa UU Perampasan Aset, upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi panggung sandiwara tanpa pemulihan aset negara yang nyata. PKS berkeyakinan bahwa memulihkan kerugian negara secara maksimal adalah satu-satunya jalan untuk menutup lubang kebocoran fiskal nasional.

Siasat legislasi PKS juga menyasar pada penguatan otonomi ekonomi desa. Mereka memahami bahwa kesejahteraan nasional bermula dari kemandirian setiap desa di Indonesia. Melalui pembahasan revisi UU Desa, Fraksi PKS berupaya memastikan bahwa peningkatan Dana Desa dibarengi dengan penguatan kapasitas

> Narasi 'Negara Hadir' tidak boleh hanya berhenti di lantai granit gedung Senayan; ia harus membumi hingga ke gang-gang sempit di Jakarta dan pemukiman warga di pesisir Tegal

manajerial perangkat desa agar tidak terjadi penyimpangan. Desa harus menjadi sentrum pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri, bukan sekadar kantong suara yang didatangi di setiap menjelang pemilu.

Di tengah tarik-ulur kepentingan politik nasional, Fraksi PKS tetap memposisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat yang kritis. Konsistensi dalam menjaga marwah anggaran adalah bentuk tanggung jawab moral yang besar kepada para pemilih di seluruh Indonesia. Bagi PKS, dompet rakyat adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh kebijakan fiskal yang serampangan dan tidak memiliki empati pada kondisi ekonomi masyarakat bawah.

Transparansi anggaran negara menjadi harga mati bagi Fraksi PKS. PKS mendorong penggunaan teknologi digital yang terintegrasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meminimalisir celah korupsi dan pungutan liar. Dengan sistem yang terbuka dan transparan, rakyat bisa ikut mengawasi ke mana setiap rupiah pajak mereka mengalir secara real-time. Inilah esensi dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya dalam mengawal harta bersama milik seluruh bangsa.

Melalui kerja-kerja sunyi di ruang komisi dan pernyataan tegas di meja perundingan, para Aleg PKS seperti Anis Byarwati dan Mulyanto sedang membangun arsitektur kebijakan yang lebih adil bagi rakyat. Mereka menyadari bahwa pertempuran di parlemen adalah maraton panjang yang memerlukan napas kesabaran dan ketajaman analisis data. Namun, selama dompet rakyat masih terancam oleh kebijakan yang tidak adil, siasat legislasi demi keadilan bagi wong cilik tidak akan pernah berhenti disuarakan.

Akhirnya, politik bagi Fraksi PKS adalah jalan pengabdian tanpa henti untuk mewujudkan tatanan Masyarakat Madani. Di balik angka-angka rupiah yang rumit, ada impian anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan layak dan kesehatan yang terjamin. Tugas mereka adalah memastikan impian itu tidak kandas di meja perundingan para elite, melainkan menjelma menjadi kenyataan pahit bagi para koruptor dan menjadi kenyataan manis yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia

Gema di Daerah: Membumikan Keadilan di Setiap Jengkal Wilayah

Narasi "Negara Hadir" tidak boleh hanya berhenti di lantai granit gedung Senayan; ia harus membumi hingga ke gang-gang sempit di Jakarta dan pemukiman warga di pesisir Tegal. Di sinilah peran krusial para Aleg PKS di tingkat DPRD sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi harian masyarakat. Bagi mereka, politik daerah adalah seni memastikan bahwa kebijakan nasional tidak "menguap" saat sampai di level teknis pelaksanaan di daerah.

Di jantung ibu kota, Achmad Yani (Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS) menjadi sosok yang paling dicari warga saat urusan layanan dasar tersendat. Ia memfokuskan kiprahnya pada advokasi jaring pengaman sosial, memastikan warga Jakarta mendapatkan haknya melalui KJP Plus, bantuan pangan, hingga layanan kesehatan yang memadai. Baginya, Jakarta yang megah dengan gedung pencakar langitnya tidak boleh memunggungi jutaan warga yang masih berjuang untuk sekadar makan hari ini.

Kiprah Achmad Yani mencerminkan bagaimana platform Masyarakat Madani dioperasionalkan dalam skala megapolitan. Ia kerap turun langsung melakukan sidak ke puskesmas dan kantor kelurahan untuk memastikan tidak ada warga yang dipersulit saat mengurus bantuan sosial. Di bawah kawalannya, Fraksi PKS Jakarta konsisten mendorong anggaran daerah

Narasi 'Negara Hadir' tidak boleh hanya berhenti di lantai granit gedung Senayan; ia harus membumi hingga ke gang-gang sempit di Jakarta dan pemukiman warga di pesisir Tegal



yang lebih inklusif, memprioritaskan pemukiman padat penduduk yang rawan banjir dan kebakaran, bukan sekadar mempercantik jalan protokol.

Bergeser ke Jawa Tengah, Amiruddin (Anggota DPRD di Tegal dari Fraksi PKS) menunjukkan kelasnya dalam advokasi keadilan pajak dan retribusi. Sesuai dengan riset yang menekankan pentingnya asas keadilan dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Amiruddin menjadi motor perlawanan terhadap kenaikan tarif pajak yang dirasa mencekik para pelaku UMKM lokal. Ia berkeyakinan bahwa kemandirian fiskal daerah tidak boleh dicapai dengan cara "memeras" keringat rakyat kecil yang baru saja mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Amiruddin mendesak agar setiap kebijakan retribusi di daerahnya didasarkan pada kemampuan riil masyarakat. Di ruang rapat paripurna DPRD, ia seringkali mengingatkan eksekutif bahwa pajak daerah seharusnya menjadi instrumen untuk menata ekonomi lokal agar lebih bergairah, bukan menjadi penghalang bagi inovasi warga desa. Perjuangan ini selaras dengan rekam jejak PKS yang tertuang dalam media eksternal (tegal.pks.id) mengenai penolakan kebijakan fiskal daerah yang tidak proporsional.

Kehadiran Aleg seperti Achmad Yani dan Amiruddin adalah bukti bahwa PKS meletakkan kader-keder terbaiknya untuk menjaga dompet rakyat di tingkat lokal. Mereka

> Keberhasilan 'Negara Hadir' akan diukur dari seberapa puas warga di daerah saat berurusan dengan birokrasi dan seberapa aman dompet mereka dari tarikan pajak yang tidak adil."

memahami bahwa korupsi dan inefisiensi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga seringkali bersembunyi di balik regulasi daerah yang kabur. Dengan ketajaman pengawasan, mereka memastikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat benar-benar terkonversi menjadi kualitas hidup yang lebih baik bagi konstituennya.

Di daerah, tantangan "Negara Hadir" seringkali berwujud masalah teknis yang pelik, mulai dari jalan rusak di pelosok hingga kelangkaan pupuk bagi petani. Aleg PKS di DPRD mengambil peran sebagai jembatan yang kokoh. Mereka mengawal aspirasi warga melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), memastikan usulan dari tingkat RW dan Desa tidak hilang ditelan birokrasi kecamatan atau kabupaten yang berbelit.

Kiprah di daerah juga berarti menjaga nilai-nilai keluarga sebagai benteng sosial. Para Aleg DPRD PKS konsisten mendukung program-program penguatan keluarga miskin melalui APBD. Mereka percaya bahwa daerah yang kuat bermula dari keluarga-keluarga yang mandiri dan sejahtera. Ini adalah manifestasi dari arsitektur kebijakan publik yang utuh, dari kebijakan makro nasional hingga intervensi mikro di tingkat lokal.

Melalui konsistensi Achmad Yani di Jakarta dan Amiruddin di Tegal, PKS sedang mengirimkan pesan kuat: bahwa keadilan tidak mengenal jarak. Setiap jengkal wilayah Indonesia berhak mendapatkan kehadiran negara yang hangat dan melayani. Bagi para Aleg ini, jabatan di DPRD bukanlah kursi kekuasaan, melainkan meja pelayanan di mana setiap keluhan warga harus dicarikan solusinya secara nyata.

Pada akhirnya, keberhasilan "Negara Hadir" akan diukur dari seberapa puas warga di daerah saat berurusan dengan birokrasi dan seberapa aman dompet mereka dari tarikan pajak yang tidak adil. Para Aleg DPRD PKS telah membuktikan diri sebagai penjaga mandat yang setia, memastikan bahwa janji-janji kesejahteraan benar-benar mendarat di depan pintu rumah rakyat, bukan sekadar menjadi tumpukan dokumen yang tak bermakna di kantor gubernur atau bupati.

Sebagian Jejak Digital Legislasi:

Aspirasi yang Berbuah Kebijakan (Data & Fakta)

Pelaku Advokasi	Fokus Isu & Kebijakan	Sumber Bahan / Media Eksternal
Kurniasih Mufidayati	Bansos berkelanjutan untuk kelompok rentan.	RRI.co.id (16/08/2023)
Netty Prasetiyani	Perlindungan keluarga & RUU KIA.	Kompas.com / PKS.id
Anis Byarwati	Keadilan Pajak Daerah (PDRD) & Efisiensi Banggar.	Tegal.pks.id (2023)
Mulyanto	Pemberantasan Mafia Tambang & Kedaulatan Energi Nasional.	CNBC Indonesia (2024)
Achmad Yani (DKI)	Kawal KJP Plus & Hak Warga Jakarta.	Jakarta.pks.id
Amiruddin (Tegal)	Penolakan pajak daerah tidak adil bagi UMKM.	Tegal.pks.id (2023)
Fraksi PKS	Percepatan RUU Perampasan Aset.	Kompas.com (03/09/2025)

Seluruh narasi di atas disusun berdasarkan
Riset Negara Hadir, Platform Masyarakat Madani,
dan Rekam Jejak Legislasi PKS 2024-2025.

6

Sekilas PKS



PKS Terima Penghargaan IIP 2025

Bali, 11 Februari 2026 – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih penghargaan sebagai partai dengan capaian terbaik dalam Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025. Penghargaan dari Kemenko Polkam dan BRIN ini diterima Sekjen PKS Muhammad Kholid di Bali, Rabu (11/2/2026).

"Alhamdulillah kami dapat melanjutkan capaian tahun sebelumnya," ujar Kholid usai menerima penghargaan dari Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus.

Kholid menyebut penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif kader dan pengurus pusat hingga daerah. IIPP menilai tata kelola partai dari aspek kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, hingga transparansi keuangan. Menurutnya, capaian ini menjadi pijakan untuk terus berbenah, bukan tujuan akhir.

"Penguatan good political party governance terus kami tingkatkan untuk merawat kepercayaan masyarakat," tegasnya.

Kecam Serangan AS-Israel Ke Iran, HNW Minta Prabowo Konsisten pada Konstitusi



JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, M. Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan keprihatinan atas serangan AS dan Israel ke Iran yang dinilainya menjauhkan perdamaian dan meruntuhkan legitimasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Ia mengingatkan Presiden Prabowo agar tetap konsisten pada konstitusi jika melakukan mediasi, tidak hanya terkait perang di Timur Tengah, tetapi juga konflik Pakistan vs Afghanistan.

"Pernyataan Kemlu bahwa Presiden siap memediasi perlu diingatkan koridor konstitusionalnya. Sangat wajar jika Presiden Prabowo selain ke Teheran dan Washington juga ke Islamabad dan Kabul," ujar HNW di Jakarta, Minggu (1/3). Menurutnya, pendekatan dialog harus dikedepankan karena perang hanya melahirkan korban kemanusiaan dan merusak tatanan hukum internasional.

Politisi Fraksi PKS ini juga mendorong pemerintah menggandeng PBB dan OKI untuk menggelar Sidang Luar Biasa guna menghentikan eskalasi konflik. Selain itu, ia mengingatkan perlunya perlindungan efektif bagi WNI yang berada di kawasan perang, baik di Timur Tengah maupun Asia Selatan.

Sekjen PKS Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di tengah eskalasi militer di Teheran. Ia mengecam keras operasi militer terhadap negara berdaulat yang menimbulkan korban jiwa, karena dinilai dapat memperluas konflik kawasan dan melanggar prinsip kedaulatan serta hukum internasional.

Kholid mendorong Pemerintah

Indonesia untuk konsisten menjalankan politik bebas aktif dengan mengambil peran konstruktif dalam mendorong de-eskalasi dan dialog. Indonesia, menurutnya, harus menjunjung tinggi kedaulatan negara, menolak agresi, serta mengajak semua pihak menahan diri demi mencegah meluasnya konflik militer.

PKS memandang dinamika di Timur Tengah berimplikasi luas pada stabilitas global dan ketahanan ekonomi dunia. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk terus berperan aktif mewujudkan perdamaian dunia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

Presiden PKS Kukuhkan Pengurus DKM Masjid Al 'Adalah 2025-2030



Jakarta – Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengukuhkan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al 'Adalah masa bakti 2025-2030 di Kantor DPTP PKS, Jumat (27/02/2026). Pengukuhan ini menjadi simbol komitmen partai dalam memakmurkan rumah Allah sebagai salah satu dari lima rumah perjuangan PKS.

Sebelum membacakan ikrar, Almuzzammil menanyakan kesiapan para pengurus yang dipimpin Derysmono. Ikrar tersebut menegaskan ketaatan kepada Allah, keikhlasan dalam amanah, pelayanan prima kepada jamaah, menjaga ukhuwah, serta transparansi pengelolaan aset dan keuangan.

Pengukuhan ini merupakan bagian dari upaya PKS memperkuat fungsi dakwah, khususnya di lingkungan kantor partai dan ekosistem digital. Para pengurus yang dikukuhkan secara resmi siap mengemban amanah memakmurkan masjid.

Kekuasaan

pada hakikatnya, hanyalah alat untuk melayani. Tanpa rasa kemanusiaan, kebijakan hanya akan menjadi barisan angka yang dingin.

